BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan Daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan (*unitary state*), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultur/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerahnya, suasana demokrasi lokalnya, dan latar belakang pembentukan Daerah masing-masing, mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan (W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono, 2009: 1).

Berbicara dalam konteks negara kesatuan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun, karena Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka terdapat tugas-tugas tertentu yang diserahkan sekaligus dilaksanakan oleh Daerah, sehingga menimbulkan adanya hubungan antara Pusat dan Daerah, baik dalam bidang kewenangan, keuangan maupun pengawasan. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam rangka menjaga keseimbangan antara Indonesia sebagai negara kesatuan dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa ketentuan yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan-perubahan besar dalam setiap segi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka NKRI. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan Daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Indonesia sebagai *unitary state* menganut kombinasi antara unsur pengakuan kewenangan terhadap Daerah untuk mengelola secara mandiri keuangannya dipadukan dengan unsur kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan transfer fiskal, melakukan pengawasan terhadap kebijakan fiskal Daerah (W. Riawan Tjandra, 2013: 139). Selain itu, pemerintahan yang didesentralisasi (*decentralized government*), juga mengharuskan adanya *legal framework* keuangan daerah yang menjabarkan kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan

Daerah. Hal ini disebabkan terdapat korelasi yang erat antara keuangan Negara dengan keuangan Daerah (W. Riawan Tjandra, 2013: 42). Salah satu tujuan dari kewenangan seluas-luasnya yang diberikan kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, peningkatan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana.

Idealnya, dalam hal pembiayaan atas pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi), setiap Daerah seharusnya mempunyai kesanggupan untuk membiayai dirinya sendiri dari sumber-sumber pendapatan Daerah khususnya PAD yang dimilikinya. Namun, mengingat alokasi sumber-sumber pendapatan yang dikuasai Daerah sangat terbatas dan berbeda antara satu Daerah dengan yang lainnya, maka PAD belum sepenuhnya dapat menutupi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan permasalahan ini, dapat dimengerti jika Daerah membutuhkan sumber pembiayaan di luar PAD untuk menutupi kekurangan anggaran belanja. Oleh karenanya, perimbangan sumber keuangan antara Pusat dan Daerah sangatlah dibutuhkan untuk membantu Daerah-daerah yang berpendapatan rendah dan kurang berpotensi (Adrian Sutedi, 2009: 26).

Selanjutnya, pengelolaan keuangan Daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai elemen penting dari otonomi. Kinerja tersebut dapat dilihat dari

proses penyusunan APBD, pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya (Bachrul Amiq, 2010: 24). Pasal 1 butir 32 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksudkan dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan bagian esensial dari perbincangan tentang pengelolaan keuangan Daerah. APBD adalah kristalisasi pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan kebutuhan publik (*public oriented*).

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah, proses penyusunan APBD dilakukan melalui saluran eksekutif yang dirumuskan melalui kegiatan Musrenbang dan perumusan kepentingan oleh legislatif melalui kegiatan Jasmas yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun dirumuskan oleh Partai Politik melalui masing-masing fraksi. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Sementara itu, Jasmas merupakan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh legislatif yang kemudian dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan usulan dalam penyusunan APBD.

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Istimewa yang dimiliki DIY adalah wewenang tambahan tertentu

selain wewenang yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari kewenangan dalam bidang keuangan, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan di Daerah berlaku juga bagi DIY. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah berlaku bagi pemerintahan DIY dengan tetap memperhatikan pengaturan kewenangan urusan keistimewaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 (lihat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2012).

Sehubungan dengan pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan Perda di DIY tidak terlepas dari semua ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Inisiatif pembentukan Perda di DIY dapat berasal dari DPRD maupun dari Gubernur. Materi muatan Perda yang dibentuk meliputi seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang ditentukan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, antara Perda APBD dan Perda pada umumnya sejatinya memiliki perbedaan. Sehubungan dengan Perda APBD, sesungguhnya tidaklah dapat disamakan dengan Perda yang umumnya berlaku di Daerah. Perda APBD memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya berbeda dengan Perda lainnya. Ditinjau dari sisi daya berlakunya, Perda APBD ditetapkan setiap tahun

sesuai dengan perhitungan tahun anggaran kinerja. Selain itu, ditinjau dari sisi kekuatan mengikatnya, Perda APBD hanya mengikat Pemerintah.

Guna membentuk negara yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini khususnya dalam konteks ini adalah Perda tentang APBD sudah semakin terbuka dan telah menjadi isu penting dalam rangka mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Jika rakyat selama ini hanya dilihat sebagai obyek, maka pemberdayaan masyarakat menuntut rakyat sekaligus diposisikan sebagai subyek dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan negara adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Keberadaan lembaga perwakilan lebih merupakan representasi fisik (kelembagaan), sementara relasi negara dan masyarakat perlu dimaknai sebagai wujud nyata gerakan reformasi. Lembaga perwakilan tetap diperlukan, tetapi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik, rakyat perlu dilibatkan. Dengan demikian, rakyat terus terlibat secara berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menyoal pelaksanaannya, pada tahap pembentukan Perda tentang APBD, tidak terlaksananya kepentingan-kepentingan strategis dan potensial dalam rangka pembangunan Daerah dan masyarakat, serta mengalirnya konsep kebijakan yang kontra produktif justru disebabkan karena kurang terbukanya forum partisipatif antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya. Semakin menguatnya kedudukan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, ironinya tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya.

Apalagi pada dasarnya, setiap kebijakan tentunya dibiayai oleh anggaran. Pada tahap perencanaan, hal-hal yang meliputi pendefinisian masalah, pemetaan masalah, dan penentuan kelompok sasaran, nyatanya tidak diletakkan dalam konteks isi atau substansi sebagai pengukur kualitas kebijakan. Sebagai indikator pokok mekanisme kebijakan publik, rangkaian proses tersebut seharusnya menjadi poros kebijakan dan arah pembangunan di Daerah yang dimungkinkan dapat tercapainya partisipasi masyarakat. Segala hal yang dimasukkan dalam tahap penyusunan merupakan suatu proses lanjutan dari apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam tahap perencanaan, sehingga kecil kemungkinan akan melibatkan partisipasi masyarakat. Tentu saja karena agenda dalam tahap penyusunan hanya sebatas pada prosedur formal perumusan kebijakan. Sebagai instrumen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, tahap perencanaan juga seharusnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, bukan berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan Daerah hanya sampai pada perencanaan kebijakan semata. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam tahap pelaksanaan kebijakan.

Dalam perkembangannya, tidak sedikit Daerah di Indonesia yang mengalami hambatan-hambatan proses pemerintahan dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat di Daerah. Alasan memilih DIY sebagai lokasi penelitian tentunya dikarenakan kompleksitas persoalan pembangunan dan fragmentasi sosial yang terjadi di DIY. Selain itu, juga dilihat dari kultur masyarakat DIY

dengan nilai-nilai kehidupan yang dimilikinya. Misalnya, budaya “musyawarah-mufakat” dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Menilik dari perspektif tata pemerintahan demokratis dalam masyarakat DIY, prosedur pengambilan keputusan kolektif seperti itu menjadi pola yang menjangar dan pada akhirnya melahirkan sistem pemerintahan kolektif. Akan tetapi, dalam tataran implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu, meskipun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibuka ruang aspirasi bagi masyarakat bukan berarti pendapat-pendapat dari ruang aspirasi tersebut akan diutamakan.

Tesis ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD di DIY. Melalui kebijakan otonomi daerah, Daerah seharusnya melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang searah dengan kebutuhan sekaligus memecahkan stagnasi penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang terjadi selama ini. Topik penulisan hukum ini dirasakan penting dan menarik dikarenakan permasalahan yang dibahas sering menjadi sorotan di berbagai Daerah di Indonesia saat ini. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wawasan kepada publik, permasalahan hukum ini perlu dilihat sebagai permasalahan bersama, dipahami, dan dimengerti oleh publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis perlu mencari, meneliti dan menganalisis akar dari permasalahan yang

dihadapi tersebut dan dinyatakan dalam solusi yang tepat dan akurat, sehingga dalam perkembangannya penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain partisipasi pasyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD di DIY.
- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai agenda tersendiri dalam menata dan mendesain partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD di DIY.
- c. Bagi Penulis, penelitian hukum ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Penulis terutama secara akademik.

Harapan lainnya adalah penelitian hukum ini dapat dijadikan wadah pembelajaran bagi siapa saja dalam memperdalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, berdasarkan hasil penelusuran Penulis, maka dengan ini Penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY”, belum pernah diteliti oleh Peneliti lain dan bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan temanya dengan penelitian yang diangkat Penulis, tetapi dalam hal ini Penulis memaparkan perbedaannya, antara lain sebagai berikut:

Arther Henpri Moniung, Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (NIM. 1223208021).

1. Judul Penelitian Hukum (Skala Tesis; 2015): Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana pengaturan mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

3. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui dan menganalisis bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.

4. Hasil Penelitian:

- a. Guna menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, maka dibutuhkan adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, partisipasi dalam bentuk penelitian, partisipasi masyarakat dalam

bentuk masukan melalui media cetak, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa.

- b. Pengaturan mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dilaksanakan pada setiap tahapan pembentukan Perda mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Namun pengaturan mengenai pelaksanaan teknis dari partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Perda belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya mengimplementasikan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011.

5. Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum pembeding, antara lain:

- a. Penulisan hukum ini khusus membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dan membahas upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sedangkan, penulisan hukum pembeding tertuju pada bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum (tidak merujuk pada Perda dan

khususnya tentang APBD) dan implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011;

- b. Kajian teori dalam penulisan hukum ini berbeda dengan kajian teori yang digunakan dalam penulisan hukum perbandingan; dan
- c. Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah DIY.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih Penulis untuk Penulisan Hukum dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY” ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

- a. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014;

Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (lihat Pasal 1 butir 41 UU Nomor 23 Tahun 2014).

- b. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011;

Partisipasi masyarakat ialah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau

seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (lihat Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011).

2. Pembentukan

Pengertian pembentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membentuk (Departemen Pendidikan Nasional 2008, 174).

3. Peraturan Daerah

a. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 butir 7 UU Nomor 12 Tahun 2011).

b. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014;

Perda yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 1 butir 25 UU Nomor 23 Tahun 2014).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda (lihat Pasal 1 butir 32 UU Nomor 23 Tahun 2014).

b. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD (lihat Pasal 1 butir 8 UU Nomor 17 Tahun 2003).

5. Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (lihat Pasal 1 butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2012).

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI:

Bab ini memuat penjelasan-penjelasan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan DIY, dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY. Bab ini juga memuat penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan, antara lain Teori Perundang-undangan, Teori Otonomi Daerah, Teori Partisipasi Masyarakat. Teori-teori ini digunakan untuk

mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD di DIY.

BAB III METODE PENELITIAN:

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN:

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD di DIY, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB V PENUTUP:

Bab ini berisi Kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.